



AKUNTABILITAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMAMPU PADA SEMESTER I TAHUN 2015

| | |
|------------------------|-------------------|
| Batas Dana PERMAMPU | 10.101.678.911,67 |
| Saldo Program PERMAMPU | 22.811.886,00 |
| Bunga Bank – PERMAMPU | |
| Total Pengeluaran : | 10.124.091.297,67 |

| Pencapaian | Budget | Realisasi Capaian | Capaian Semester 1 2015 |
|---|----------------|-------------------|-------------------------|
| Manajemen – PERMAMPU | | | |
| 1.1 Honorarium – PERMAMPU | 459.000.000,00 | 369.247.500,00 | 84,78 |
| 1.2 Operasional Kantor – PERMAMPU | 86.000.000,00 | 87.317.616,00 | 79,29 |
| 1.3 Picturament – PERMAMPU | 31.000.000,00 | 30.285.000,00 | 116,99 |
| I. Program – PERMAMPU | | | |
| 2.1 Rekrutur emam buahan (2 per lembaga) | 158.700.000,00 | | 0,00 |
| 2.2 Riset koordinasi para Direktur | 85.600.000,00 | 28.287.500,00 | 43,09 |
| 2.3 Capacity building untuk anggota (2 lembaga) | 140.000.000,00 | 50.755.400,00 | 36,25 |
| 2.4 Pemenuhan jaringan nasional dan internasional | 47.600.000,00 | 6.664.600,00 | 16,20 |
| 2.5 Monitoring 3 bulanan ke lembaga anggota (2 lembaga) | 112.000.000,00 | 35.475.000,00 | 31,67 |
| 2.6 Training audi partasiat | 25.200.000,00 | | 0,00 |

Laporan Realisasi Anggaran PERMAMPU Pada Semester I tahun 2015

FKPAR



Forum Komunitas Akar Rumput Untuk Perlindungan HKSR Perempuan di Pulau Sumatera

CERITA PERUBAHAN



2

MURNI bekerja untuk rakyat, menuju Desa Mandah yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Ibu Rumah Tangga Menuju Kepala Desa

Menyampaikan Inisiatif Perempuan Akar Rumput kepada Para Pihak untuk Perubahan Kebijakan HKSR



M elihat dan menangkap pembelajaran dan cerita-cerita keberhasilan yang terjadi pada perempuan akar rumput menjadi hal penting dalam perjalanan Program Advokasi HKSR perempuan PERMAMPU melalui penguatan kepemimpinan perempuan pada enam bulan pertama di tahun 2015 di Sumatera. Keberhasilan dan perubahan kecil tersebut merupakan inisiatif yang sudah dimulai dan akan terus ditularkan pada sesama perempuan, khususnya pada para pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota. Keberhasilan kecil itu telah mulai dicapai, seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, mengurangi tindakan aborsi yang tidak aman, mengembangkan pengetahuan lokal akan perawatan kandungan dan persalinan. Sementara itu, yang paling mendasar adalah cerita perubahan untuk membangun kekuatan ekonomi keluarga dan kelompok perempuan akar rumput serta mengembangkan beragam bentuk solidaritas sesama masyarakat miskin.

Akuntabilitas PERMAMPU sebagai sebuah organisasi kepada penerima manfaat utama yaitu perempuan akar rumput dan para pihak menjadi landasan untuk saling percaya dan terbuka. PERMAMPU mengedepankan keterbukaan dan keterkaitan antar *stakeholders* untuk saling menguatkan dan mendukung dalam mengurai isu kemiskinan yang berdampak pada pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan di pedesaan dan miskin kota. Hubungan antar *multi-stakeholder* juga diharapkan sebagai media belajar bersama, menemukan cara dan metode baru dalam memperbaiki layanan dan mengurangi kemiskinan perempuan dalam aspek pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Sekaligus membuka pemahaman dan cara pandang yang komprehensif dalam membuat kebijakan pelayanan HKSR sesuai konteks lokal dengan pendekatan berbasis hak perempuan. Cerita atau inisiatif perubahan di akar rumput yang dikemas dalam dialog-dialog kebijakan secara perlahan tentunya akan menjadi perhatian *stakeholders* untuk menerimanya masuk dalam agenda program pembangunan daerah setempat yang bersifat permanen. Hal yang berharga dari pemikiran dan tindakan perempuan akar rumput di delapan propinsi di Sumatera dan sudah dimulai ini, akan terus bergerak agar roda kehidupan perempuan lebih sejahtera dan berkeadilan. (**Tety S dan Dina Lt**)



== Daftar Isi ==

- I. Daftar Isi | 1
- II. Salam Redaksi | 2
- III. Akuntabilitas | 3
- Capaian Program HKSR Permampu Januari – Juli | 3
 - Laporan Realisasi Anggaran PERMAMPU Pada Semester 1 Tahun 2015 | 5
- IV. FKPAR (Forum Komunitas Akar Rumput Untuk Perlindungan HKSR Perempuan di Pulau Sumatera) | 6
- Provinsi Aceh | 6
 - Provinsi Sumatera Utara | 7
 - Provinsi Sumatera Barat | 7
 - Provinsi Riau | 8
 - Provinsi Jambi | 8
 - Provinsi Sumatera Selatan | 9
 - Provinsi Bengkulu | 9
 - Provinsi Lampung | 10
- V. FMS (Forum Multi StakeHolder) | 13
- Provinsi Aceh | 13
 - PESADA | 13
 - LP2M | 13
 - APM Jambi | 14
 - Cahaya Perempuan | 14
- VI. Cerita Perubahan | 16
- Ibu Rumah Tangga Menuju Kepala Desa | 16
 - Peduli Sesama Remaja | 16
 - Proses Belajar Sepanjang Hidup | 17
 - Pembelajaran Baru | 18
 - Aku Dan Hakku Sebagai Perempuan | 19
- VII. Permampu dalam Berita | 21

Dewan Redaksi

| | |
|--------------------|---|
| Penanggungjawab | : Tety Sumeri |
| Sekretaris Redaksi | : Sustri Saragih |
| Editor Tulisan | : Dina Lumbantobing Tety Sumeri |
| Editor Foto | : Ronal Alexander Tampubolon |
| Kontributor | : Direktur Eksekutif Koord. Program/Staf Lapang Lembaga Anggota Permampu |
| Design & Layout | : Ronal Alexander Tampubolon |
| Distribusi | : Ronal Alexander Tampubolon |

Sekretariat PERMAMPU

Jl. Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 P. Bulan Medan 20141



== Salam Redaksi ==

PERMAMPU (Perempuan Sumatra Mampu) adalah sebuah konsorsium yang berjuang untuk menguatkan kepemimpinan Perempuan akar rumput, agar dapat menikmati dan memperoleh perlindungan serta pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) perempuan. Didirikan di Medan pada 27 November 2012 dengan anggota 8 (delapan) ORNOP/LSM Perempuan di Pulau Sumatera meliputi: Flower Aceh - Aceh, PESADA - SUMUT, LP2M - SUMBAR, PPSW Sumatera - Riau, APM - Jambi, WCC Palembang - SUMSEL, Cahaya Perempuan WCC - Bengkulu dan DAMAR - Lampung.

Newsletter adalah salah satu media publikasi yang dipilih PERMAMPU untuk menyajikan berbagai aktivitas untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan HKSR perempuan; serta mengubah pendekatan dari berbasis kewajiban warganegara/perempuan kepada pendekatan berbasis kewajiban Negara berasas hak perempuan.

Edisi perdana ini akan menyajikan capaian program PERMAMPU dalam rangka perlindungan & pemenuhan HKSR perempuan (ini bisa dihilangkan) di 8 (delapan) propinsi wilayah kerjanya selama semester pertama tahun 2015. Demikian juga berbagai Inisiatif baru yang muncul bersama perempuan akar rumput dampingan lembaga anggota mengenai HKSR untuk publikasi dan perubahan akses pelayanan Kespro perempuan di tingkat desa sampai kabupaten. Membangun sinergi, memahami kebijakan dan peraturan pemerintah daerah dan stakeholders/para pihak berkaitan dengan pemenuhan HKSR perempuan melalui forum *multi stakeholders* dan diskusi kritis secara periodik di tingkat Kota/Kabupaten, bahkan di pedesaan/kelurahan. Kami berharap, kehadiran newsletter ini dan segenap informasi yang disajikan bermanfaat dan dapat menguatkan pemahaman pembaca atas perjuangan bahwa perempuan otonom atas tubuhnya, sehat dan kreatif.

Selamat membaca!

Tety Sumeri



Terdapat peningkatan jumlah penerima manfaat langsung di periode April s/d Juni sbb:

- Jumlah perempuan dari 5.765 orang menjadi 7.850 orang, laki-laki dari 1.227 menjadi 1.780 orang.
- Pendengar radio dari 11.000 orang menjadi 14.000 orang.
- Penambahan jumlah penerima manfaat dari media online mengenai HKSR yang telah dibaca sebanyak 18.209 kali.
- Terbentuk **49 kelompok baru** dengan jumlah 934 perempuan dan 376 laki-laki.
- Memperkuat dan mengembangkan 141 kelompok yang sudah ada dengan jumlah 3.579 perempuan dan 34 laki-laki.
- Terbentuk 5 kelompok perempuan basis di pedesaan dengan jumlah 224 orang perempuan
- Terbentuk 8 kelompok PIK-R dengan jumlah 134 perempuan dan 106 laki-laki.

| Nama kelompok | # kelompok perempuan yang dibentuk dalam periode pelaporan | # anggota | |
|--|--|-------------|-------------|
| | | # perempuan | # laki-laki |
| Kelompok Perempuan Muda | 49 kelompok | 934 | 376 |
| Kelompok Perempuan yang dikembangkan (kelompok yang telah ada dan diperkuat) | 141 kelompok | 3.579 | 34 |
| Kelompok perempuan basis di pedesaan dan miskin kota | 5 kelompok | 224 | - |
| PIK-R dan kelompok perempuan muda di sekolah | 8 kelompok | 134 | 106 |

TANTANGAN

- Dua lembaga mengalami tantangan secara operasional, baik karena dipertanyakan izin operasional lembaga (LP2M) maupun isu aliran sesat (Flower Aceh).
- Reaksi keras dari tokoh agama atas PP no. 61 tahun 2014, khususnya tentang pengecualian untuk aborsi.
- Penolakan pihak penyedia layanan bekerja sama dengan Pembatras
- Mengelola kerjasama antar NGO di lapang, untuk menghindari kesan *double identity*, wilayah yang berimpit.
- Mendidik staf WCC untuk pengorganisasian yang tidak berbasis penguatan ekonomi.
- Sementara itu, masih ada anggota kelompok yang belum yakin bahwa usaha simpan pinjam yang bermodalkan dari anggota saja akan memperkuat ekonomi kelompok. ■ (Dina Lt & Tety



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMAMPU PADA SEMESTER I TAHUN 2015

| Sumber Dana PERMAMPU: | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Hibah Program PERMAMPU | | | 10,101,579,911.57 |
| Bunga Bank -- PERMAMPU | | | 22,511,386.00 |
| Total Pengeluaran : | | | <u>10.124.091.297.57</u> |
| Penjelasan | Budget | Realisasi Capaian | Capaian Semester 1 2015 |
| I. Manajemen -- PERMAMPU | | | |
| 1.1 Honorarium -- PERMAMPU | 459,000,000.00 | 389,047,500.00 | 84.76 |
| 1.2 Operasional Kantor -- PERMAMPU | 86,000,000.00 | 67,317,616.00 | 78.28 |
| 1.3 <i>Procurement</i> -- PERMAMPU | 31,000,000.00 | 36,265,000.00 | 116.98 |
| II. Program -- PERMAMPU | | | |
| 2.1 Review enam bulanan (2 per lembaga) | 158,700,000.00 | | 0.00 |
| 2.2 Rapat koordinasi para Direktur | 65,600,000.00 | 28,267,500.00 | 43.09 |
| 2.3 <i>Capacity building untuk anggota (2 lembaga)</i> | 140,000,000.00 | 50,755,400.00 | 36.25 |
| 2.4 Pertemuan jaringan nasional dan internasional | 47,600,000.00 | 8,664,600.00 | 18.20 |
| 2.5 Monitoring 3 bulanan ke lembaga anggota (2 lembaga) | 112,000,000.00 | 35,475,000.00 | 31.67 |
| 2.6 Training audit partisipatif | 25,200,000.00 | | 0.00 |
| 2.7 <i>Collective action</i> | 550,000,000.00 | 277,516,850.00 | 50.46 |
| III. Kegiatan Lembaga Anggota PERMAMPU | | | |
| 3.1 Pengorganisasian | 2,676,765,000.00 | 2,202,242,170.00 | 82.27 |
| 3.2 Inovasi | 133,500,000.00 | 16,033,200.00 | 12.01 |
| 3.3 Advokasi masyarakat adat | 212,605,000.00 | 199,956,400.00 | 94.05 |
| 3.4 Advokasi negara | 429,905,000.00 | 207,921,175.00 | 48.36 |
| 3.5 Advokasi institusi pendidikan | 358,508,750.00 | 155,147,000.00 | 43.28 |
| 3.6 Advokasi institusi agama dan tokoh agama | 319,480,000.00 | 164,777,100.00 | 51.58 |
| 3.7 <i>Networking & learning</i> | 272,155,000.00 | 375,858,425.00 | 138.10 |
| 3.8 <i>Capacity building & knowledge management</i> | 447,205,000.00 | 477,895,167.00 | 106.86 |
| 3.9 Monitoring dan Evaluasi | 285,780,000.00 | 164,236,500.00 | 57.47 |
| 3.10 Manajemen & Operasional Lembaga Anggota | | | |
| 3.10.1 Honorarium | 837,150,000.00 | 821,075,854.00 | 98.08 |
| 3.10.2 Operasional Kantor | 367,322,000.00 | 324,970,538.00 | 88.47 |
| 3.10.3. <i>Procurement</i> | 253,000,000.00 | 352,173,050.00 | 139.20 |
| 3.11. <i>Corefund</i> | 1,059,535,744.00 | 715,238,380.00 | 67.50 |
| Pajak bank | - | 4,502,277.00 | 100.00 |
| Administrasi bank | | | |
| Total | 9,328,011,494 | 7,075,336,702 | 75.85 |



Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput untuk Perlindungan HKSR Perempuan di Pulau Sumatera

Provinsi Aceh



Foto Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Wilayah Aceh/Dok. PERMAMPU

Lokakarya Pembentukan Forum Perempuan Akar Rumput Provinsi Aceh telah berhasil mengidentifikasi kondisi perempuan di Aceh antara lain:

1. Budaya patriarkhis yang masih berkembang dan mempengaruhi cara berfikir masyarakat di Aceh
2. Rendahnya alokasi anggaran dan program untuk pemberdayaan perempuan (tidak mencapai 5%).
3. Masih adanya kebijakan pemerintah yang justru mendiskriminasikan perempuan.
4. AngkaKTP dan KDRT tinggi, dan banyak kasus yang sulit terungkap, bahkan korban seringkali dikriminalkan.
5. Akses perempuan terhadap informasi dan pendidikan masih rendah.
6. Akses perempuan terhadap jaminan sosial yang

diselenggarakan oleh pemerintahan minim.

7. Partisipasi perempuan di legislatif rendah (11%); DPRA 2 orang dan DPRK 50 orang).
8. Pelibatan perempuan dalam forum musyawarah dan forum pengambilan kebijakan masih sangat rendah (tingkat Desa sampai Provinsi).
9. Tingginya angka perempuan yang menikah sirih dan menikah di usia dini.

Adapun tujuan dari forum ini adalah:

- Memperkuat organisasi kelompok perempuan di tingkat komunitas untuk melahirkan kader-kader perempuan potensial,
- Mempengaruhi kebijakan dan anggaran yang memihak pada perempuan,
- Memperkuat gerakan perempuan akar rumput



Provinsi Sumatera Utara

Dok. PERMAMPU—PESADA



Terbentuknya Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera Utara, merupakan wadah bersama dari perempuan akar rumput dampingan mitra MAMPU SUMUT, akan melakukan gerakan bersama terkait isu – isu strategis di wilayah/kabupaten masing-masing. Adapun yang menjadi visi forum ini adalah mandiri, sejahtera, dan berkeadilan gender. Misi forum ini adalah:

1. Pendidikan dan kesadaran kritis.
2. Advokasi kebijakan.
3. Membangun hubungan dengan tokoh adat dan tokoh agama.
4. Membangun hubungan pemangku kepentingan.

Melalui forum ini diharapkan dapat tercapai:

1. Pemahaman yang sama program MAMPU di SUMUT khususnya tingkat akar rumput.
2. Membangun gerakan perempuan akar rumput dampingan Mitra MAMPU di SUMUT.
3. Bertambahnya pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan akar rumput.
4. Terbentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput mitra MAMPU di SUMUT.

Provinsi Sumatera Barat

Adapun anggota organisasi yang datang adalah dari lembaga KPI SUMBAR, LP2M, Nurani Perempuan WCC, Pambangkik Batang Tarandam, dan Pekka. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah perkenalan antar lembaga, menyepakati model/bentuk dan tujuan Forum Komunitas, menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing mitra MAMPU, dan menyepakati nilai/prinsip kerja sama dalam membangun dan memperkuat Forum Komunitas.



Foto Forum Komunitas Akar Rumput—Sumatera Barat/Dok.Permampu

Rapat kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2015 dengan agenda membahas persiapan untuk acara Forum MAMPU untuk akar rumput dan membahas kepanitian.



Rapat ketiga diselenggarakan pada tanggal 04 Mei 2015. Dalam agenda tersebut diputuskan bahwa forum akan dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Juni, tempat pelaksanaan, peserta yang akan diundang, dan teknis pelaksanaan.

Kegiatan Lokakarya dan Peluncuran Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera Barat dilakukan dengan melibatkan 68 orang mewakili dari perempuan akar rumput, staf pendamping, direktur dari lembaga-lembaga mitra Program MAMPU di Sumatera Barat yakni LP2M, KPI SUMBAR, Pekka, Pambangkik Batang Tarandam (PBT), dan Nurani Perempuan WCC.



Foto Lokakarya Pembentukan Forum Komunitas Riau/Dok.Permampu

Provinsi Riau

Forum ini terlaksana pada tanggal 20-21 April 2015. Awalnya sudah ada kelompok yang terbentuk tetapi hilang muncul dan setelah ada pendampingan kelompok tersebut semakin kuat. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di provinsi Riau adalah:

1. Angka KTP dan KDRT tinggi, karena korban sulit untuk mengungkapkan kasusnya.
2. Perempuan jarang dilibatkan didalam MUSREMBANG dari tingkat desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi.
3. Masih banyak anak remaja yang putus sekolah.
4. Kurangnya akses perempuan dalam memperoleh dana-dana yang ada di desa.
5. Beban ganda perempuan karena pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri.
6. Pernikahan dini yang dikarenakan persoalan ekonomi.
7. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kurang.
8. Rendahnya pendidikan dan SDM perempuan.
9. Budaya patriarki yang masih tinggi.
10. Upah kerja laki-laki dan perempuan dibedakan, laki-laki lebih tinggi sedangkan perempuan rendah.

Hal ini menjadi pendorong terbentuknya forum bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Adapun yang menjadi visi forum ini yaitu memajukan kepemimpinan perempuan melalui pendidikan untuk memperoleh Hak Asasi Perempuan, agar mencapai kesetaraan gender, aktif, dan kreatif untuk menggali potensi dari dan peduli sosial. Tujuan utama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Provinsi Riau adalah pemberdayaan perempuan melalui 5 fokus isu yaitu, kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi, kesehatan reproduksi, pendidikan, penghapusan diskriminasi dan kesetaraan gender. Misi forum ini adalah:

1. Perempuan Indonesia bersatu, maju, mandiri sukses, beriman menjadi sehat jasmani dan rohani.
2. Penghapusan diskriminasi, bebas dari kekerasan seksual, fisik, psikologis, dan seksual.
3. Memajukan pendidikan perempuan agar mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

Nilai-nilai yang dikandung dalam forum ini adalah kesetaraan gender, pedulisosial, tanggungjawab, musyawarahdanbersatu, transparansi, demokrasi, dan beriman.

Provinsi Jambi

Lokakarya Pembentukan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Propinsi Jambi berhasil menyatukan 1.120 perempuan yang berasal dari 30 Desa, 4 Kabupaten, dan 1 Kota Madya. Forum yang telah terbentuk ini telah menyepakati beberapa pokok agenda kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah:

- Audiensi dengan Gubernur
- Proposal pendidik Pemilih
- Pembekalan pengurus forum
- Pendidikan pemilih dan pendamping tentang Pilkada, Kepemimpinan Perempuan, UU Desa, dan Pilkadaes
- Hari Kesehatan Seksual
- Pertemuan Pengurus



Foto Forum Komunitas Akar Rumput—Prov.Jambi/Dok.Permampu



Provinsi Sumatera Selatan

Dok. PERMAMPU



Foto Pembentukan Perempuan Akar Rumpit Sumatera Selatan

Perempuan akar rumput dampingan Mitra Mampu menyadari pentingnya kekuatan kolektif akar rumput dan membentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumpit Propinsi Sumatera Selatan. Forum Komunitas terbentuk pada tanggal 21 - 23 April 2015, karena baru terbentuk kerja nyata komunitas ini masih belum terlihat. Adapun yang menjadi tujuan forum ini adalah melakukan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender mulai dari desa dan nasional. Prinsip-prinsip forum ini adalah musyawarah, menghargai, tidak membedakan satu sama lain, saling menguatkan, dan saling belajar. Di forum ini juga diputuskan struktur forum yaitu rapat anggota, kemudian badan pengawas, dan tim koordinasi. Lembaga yang ada di SUMSEL ini adalah WCC dan Pekka. Kerja nyata yang diinginkan melakukan kampanye dan gerakan bersama pada saat hari peringatan perempuan.

Dok. PERMAMPU



Foto Pembentukan Perempuan Akar Rumpit Prov. Bengkulu

Provinsi Bengkulu

Yang melatarbelakangi pembentukan Forum Perempuan Akar Rumpit Provinsi Bengkulu adalah adanya perjuangan bersama untuk melepaskan perempuan dari ketidakadilan yang penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Untuk membangun kesadaran pentingnya membangun gerakan perempuan yang lebih luas, maka Cahaya Perempuan WCC dan KPI Bengkulu menyelenggarakan Lokakarya Pembentukan Forum Komunitas Perempuan Rumpit Provinsi Bengkulu pada



Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Forum Komunitas ini adalah berkeadilan gender, setara, solidaritas, berjejaring, dan mandiri. Forum ini bertujuan agar melalui forum ini terwujudlah forum gerakan perempuan akar rumput yang mampu mengadvokasi hak-hak perempuan sehingga terwujudnya berkeadilan gender sehingga bisa mandiri dan mampu memperluas jaringan kerja.

Misi forum ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas advokasi Hak Asasi Perempuan
1. Memperkuat solidaritas komunitas perempuan akar rumput di Bengkulu Meningkatkan pendidikan dan kesehatan perempuan akar rumput di Bengkulu
2. Membangun kemandirian komunitas perempuan akar rumput
3. Memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan gender, dan Memperluas jaringan kerja dengan semua organisasi se visi di tingkat Nasional.

Isu-isu strategis yang didiskusikan dalam forum ini adalah:

1. Rendahnya akses layanan informasi dan pelayanan Kespro yang terbatas bagi perempuan di desa dan miskin kota (terutama layanan yang murah/gratis).
1. Tidak optimalnya pelayanan kespro bagi remaja di PUSKESMAS.
2. Penerima manfaat perlindungan sosial (Raskin, PNPM, dan BPJS) yang tidak tepat sasaran.
3. Kurang alokasi anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh PEMDA Kab/Kota.
4. PERDA adat yang diskriminatif terhadap perempuan.

Saat ini, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Propinsi Bengkulu telah memulai upaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi dan Pemda Provinsi Bengkulu.

Provinsi Lampung

Gerakan Perempuan Lampung merupakan Organisasi massa perempuan yang lahir dari *grass root*. Berproses sejak tahun 2001, melalui pendidikan-pendidikan kritis yang difasilitasi oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR di berbagai wilayah pinggiran Lampung sehingga perempuan-perempuan “terdidik” yang berserak di

beberapa kabupaten/kota merasakan kegelisahan yang sama untuk menyatukan diri agar memiliki kekuatan.

Melalui berbagai pertemuan, kegelisahan itu terus menjadi bahan diskusi sehingga lahir ide untuk membangun organisasi bersama yang bisa mempersatukan dan memperkuat posisi perempuan Lampung. Gagasan itu diwujudkan melalui Deklarasi Gerakan Perempuan Lampung, pada tanggal 8 Maret 2008, yang dihadiri 2000-an anggota dan calon anggota. Namun tak berhenti sampai disitu saja, proses tersebut dikukuhkan dengan Kongres Pertama Gerakan Perempuan Lampung, di Wisma Haji Bandar Lampung, pada tanggal 17-19 Oktober 2009. Kongres diikuti oleh 5 Serikat yakni, Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL), Serikat Perempuan Lampung Selatan (SEPALAS), Forum Advokasi Kemanusiaan Lampung Tengah (FAK Lampung Tengah), Serikat Perempuan Lampung Timur (Perempuan Timur), dan FAKTA Tanggamus sebagai penguatan dan konsolidasi organisasi.

Secara formal Kongres Pertama Gerakan Perempuan Lampung menghasilkan : **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Organisasi, Rekomendasi yang disampaikan kepada DPRD dan Gubernur Lampung, serta Pemilihan Pengurus.** Kemudian menyusul pada 2010 pendirian Serikat Lampung Utara, yang diberi nama Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara). Kongres Kedua Gerakan Perempuan Lampung seharusnya dilaksanakan pada tahun 2012, namun baru akan terselenggara saat ini, karena tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan kongres. Namun Gerakan Perempuan Lampung terus melakukan upaya secara bersama-sama, terus menerus dan sistematis untuk memperjuangkan perubahan sosial menuju keadilan untuk semua serta untuk terselenggaranya Kongres Kedua Gerakan Perempuan Lampung. Untuk itu, dalam rangka memperkuat dan mengkonsolidasikan kelembagaan Gerakan Perempuan Lampung,



Foto Seminar dan Kongres Gerakan Perempuan Lampung



merumuskan *Garis Besar Haluan Organisasi*, serta merumuskan *Rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung, diselenggarakan Seminar dan Kongres Kedua dengan tema "Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia"* pada 5 - 7 Juni 2015. Selain 6 (enam) Serikat Perempuan di 6 kabupaten/kota, Kongres ini dihadiri pemerintah propinsi/kab/kota, Aparat Penegak Hukum, Media, Rumah Sakit, ORNOP/LSM, dan mahasiswa.

Sisi Lain Kongres Gerakan Perempuan Lampung :

- Dalam Sidang-sidang Komisi sudah dipimpin oleh perwakilan Serikat itu sendiri.
- Sudah terumuskan Program Kerja dan Rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah
- Saat Seminar dan Kongres II Gerakan Perempuan Lampung pula, BPJS memberikan layanan gratis pemeriksaan Kanker Serviks sepanjang acara.
- Dalam Seminar dan Kongres II Gerakan Perempuan Lampung bertema "Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi sebagai HAM", di depan Pimpinan Komnas Perempuan Periode 2015-2019 Budi Wahyuni, Badan PP& PA berjanji akan mendukung inisiasi kebijakan lokal.
- Rumah Sakit Ibu Anak Santa Ana berjanji akan mendukung dalam setiap kegiatan kampanye HKSR.



Foto Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Pulau Sumatera
Padang, 14-16 Mei 2015/Dok. PERMAMPU

Visi

Terwujudnya gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang mampu melakukan advokasi dan pemenuhan hak-hak perempuan yang berkeadilan gender.

Misi

- *Mengembangkan ekonomi perempuan melalui keswadayaan*
- *Pendidikan dan kesadaran kritis untuk perempuan*
- *Mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan*
- *Memperkuat jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan*



Kegiatan Lokakarya dan Peluncuran Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Pulau Sumatera dilakukan pada 14-16 Mei 2015 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 154 orang mewakili dari perempuan akar rumput, staf pendamping, direktur dari lembaga-lembaga mitra Program MAMPU di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Seluruh peserta, terutama perempuan akar rumput diberi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman tentang tindakan kolektif yang telah dilakukan selama ini dalam upaya perjuangan Hak Asasi Perempuan (HAP) di masing-masing wilayahnya. Para peserta berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi serta menyusun kesepakatan bersama yang akan menjadi gerakan bersama oleh forum tersebut. Peluncuran Forum KPAR Sumatera dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan PKBI Daerah Sumatera Barat, DPRD Komisi I Provinsi Sumatera Barat, SKPD terkait dan perwakilan LSM serta jurnalis di Sumatera Barat.

| Masalah | Akar masalah | Tugas Forum |
|---|---|---|
| Data Kemiskinan & BPJS tidak akurat | KKN, manipulasi data | Perempuan terlibat dalam pendataan keluarga miskin Perempuan melakukan pendataan agar memiliki bank data sebagai alat advokasi |
| Pendidikan Perempuan | Kemiskinan Adat/hukum adat | Paket A, B dan C untuk semua kelompok dampingan |
| Keterwakilan perempuan dalam semua tingkatan pengambilan keputusan di tingkat lokal | Kepercayaan dan dukungan tidak ada/minim Kesadaran politik perempuan lemah | Perempuan menjadi pemimpin: 1. Desa (BPD, Kades, Kadus, Sekdes, Kaur) 2. Kecamatan 3. Kabupaten Terlibat dalam seluruh proses penyelenggara PEMILU, pilkada |
| Kesehatan reproduksi | Rendahnya pengetahuan tentang tubuh dan kespro Pelayanan dan fasilitas kesehatan perempuan kurang baik/buruk | Pendidikan mengenai HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) Advokasi ketersediaan bidan desa dan dokter kandungan terutama perempuan di tingkat kabupaten ke bawah |

Table Hasil Fleno masalah dan akar masalah serta tugas forum

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH DESA | JUMAH ANGGOTA |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| ACEH | 15 KAB. | 279 DESA | 6.883 |
| SUMATERA UTARA | 19 KAB / KOTA | 309 DESA | 17.684 |
| RIAU | 1 KAB / KOTA | 20 DESA | 2.336 |
| SUMATERA BARAT | 15 KAB / KOTA | 90 DESA/ NAGARI | 3.970 |
| JAMBI | 6 KAB / KOTAMADYA | 48 DESA | 1.570 |
| SUMATERA SELATAN | 5 KAB | 79 DESA | 1.954 |
| BENGGULU | 7 KAB / KOTA | 45 DESA | 1.140 |
| LAMPUNG | 6 KAB / KOTA | 90 DESA | 2.118 |
| Total | 74 KAB / KOTA | 960 DESA | 37.655 |

Table Data Jumlah Kelompok Perempuan Dampingan di Pulau Sumatera



FMS (Forum Multi Stakeholder)

Flower—Aceh

Foto Forum Pertemuan Multi—Stakeholder—Flower Aceh/Dok. PERMAMPU



Pertemuan Forum **Multi-Stakeholder** Kota/Kabupaten dilaksanakan secara regular tiap bulannya di Aceh Utara, Banda Aceh dan Pidie. Kegiatan ini melibatkan pemangku kebijakan di institusi pemerintahan eksekutif yang meliputi SKPK terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan,

Kantor PPKB, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Puskesmas dan Camat dari kecamatan Lueng Bata, Meuraxa, Sawang dan Kuta Makmur, perwakilan tokoh adat dan agama, Ornop/LSM dan media. Forum ini disepakati sebagai Forum *Multi-Stakeholder* yang secara khusus untuk mendiskusikan tentang isu-isu HKSR, mulai dari melakukan identifikasi persoalannya, berbagi informasi tentang cara-cara penanganan persoalan terkait HKSR, sinergi program, menyusun dan melakukan advokasi bersama terkait pemenuhan HKSR di masing-masing wilayah.

PESADA - Sumatera Utara

Di wilayah dampingan PESADA, sudah terbentuk Forum Multi-Stakeholder (FMS) di 7 kabupaten di Sumatra



Foto Lokakarya Multi—Stakeholder Kab. Pakpak Bharat—PESADA/Dok. PERMAMPU

Utara, yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Langkat, Nias dan Nias Barat.

Adapun proses pembentukannya:

1. Identifikasi masing-masing tokoh di setiap kabupaten (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bidan Desa, dan Pembatras).
2. FGD untuk setiap tokoh. Tindak lanjutnya ada diskusi regular untuk setiap tokoh (Forum Adat, Forum Agama, dan Pembatras).
3. Diskusi dan *lobby* dengan Dinas Kesehatan tentang program ini dan hubungannya dengan program Dinas Kesehatan setempat.
4. Pada Perayaan Hari Perempuan Internasional, melakukan dialog publik yang menghadirkan perwakilan para tokoh, kelompok perempuan, dan instansi terkait.
5. Setelah 2 kali diskusi regular di setiap forum tokoh, dilaksanakan Lokakarya Pembentukan Forum Multi-Stakeholder.
6. Kemudian dilaksanakan “Bedah PP. no.61 tahun 2014 untuk FMS”.
7. Diskusi regular untuk penguatan FMS (Finalisasi struktur dan penentuan program kerja).

LP2M - Sumatera Barat

Pembentukan Forum *Multi-Stakeholder* di Kota Padang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Lokakarya gender dan HKSR bagi multi pihak di Kota Padang pada tanggal 15-16 April 2015 di Hotel Axana, Kota Padang. Forum tersebut disepakati dengan nama “Forum Multi pihak Peduli HKSR Kota Padang”. Anggota forum yang tergabung sementara ini masih aparaturnya pemerintahan dari level RT, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Padang. Peserta yang hadir antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB
3. Bappeda Kota Padang
4. Anggota DPRD (Komisi IV yang mengkaji tentang Pemberdayaan Perempuan/Kesehatan) Kota Padang.
5. Pengadilan Tinggi Kota Padang.
6. Pengurus P2TP2A Kota Padang.
7. PKK Kota Padang.
8. RSUD Kota Padang.
9. PKBI Sumbar
10. Camat Kuranji
11. Camat Lubuk Kilangan
12. Petugas P2N Kecamatan Kuranji.
13. Petugas P2N Kecamatan Lubuk Kilangan
14. Lurah Kuranji



15. Lurah Batu Gadang
16. Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang
17. Puskesmas (KIA dan Promkes) Kuranji
18. Puskesmas (KIA dan Promkes) Batu Gadang
19. Bidan Desa Kelurahan Kuranji
20. Ketua RW Wilayah Kelurahan Kuranji
21. Ketua RT Wilayah Kelurahan Kuranji
22. Ketua RT Wilayah Kelurahan Batu Gadang.



Foto Lokakarya Gender dan HKSR bagi Multipihak —LP2M/Dok. PERMAMPU

Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ada peraturan tentang penjualan alat kontrasepsi
2. Situs-situs porno dari warnet ditutup
3. Adanya lembaga pemerintah untuk pelestarian pembinaan/penasehat perkawinan
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HKSR
5. Pemkot menyediakan dana untuk sosialisasi atau Pembinaan calon pengantin

APM - Jambi

Diawali dengan pembentukan beberapa forum yaitu Forum Perempuan Akar Rumput, Kelompok PIK-R, Forum Tokoh Agama, Forum Tokoh Adat, Institusi Pendidikan dan Forum Suami. Setelah beberapa Forum *Stakeholders* mitra APM terbentuk, APM melakukan *hearing* dan *lobby* ke beberapa dinas/instansi terkait termasuk ke Bupati untuk proses pendekatan. Melalui metode ini diharapkan agar pemerintah bersedia memfasilitasi, baik tempat dan juga masalah kehadiran peserta dengan harapan agar bisa terlibat pada proses pembentukan FMS yang akan dilaksanakan.

Proses melaksanakan pembentukan Forum *Multi-Stakeholder* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015 dan

bertempat di Aula Kantor PKK Kab. Merangin adalah atas ijin dan rekomendasi dari pihak Pemda. Sedangkan untuk peserta pembentukan FMS, APM mengundang para ketua forum yang sudah terbentuk dengan tujuan agar para ketua forum bisa menyampaikan rekomendasi hasil kesepakatan bersama yang telah disusun dalam masing-masing forum. Selain para ketua Forum, APM juga mengundang para instansi terkait diantaranya: BPPKB & PA, Dinkes, Diknas, Kesbangpol, Bappeda, UPPA Polres Bangko, Pengadilan Agama, Kemenag, TP PKK Kab. Merangin dan Dinas PMPD. Bupati Merangin, tidak dapat hadir dan diwakili oleh Bapak Sekda.

Cahaya Perempuan WCC - Provinsi Bengkulu

Di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC telah terbentuk Forum Multi-Stakeholder di Kabupaten Rejang Lebong dan di Kota Bengkulu pada April 2015. Pada pembentukan forum ini Walikota/Bupati diwakili oleh Sekda dan APH tidak bias hadir. Namun begitu forum tetap disepakati dan tetap dibentuk oleh Sekda setempat. Peserta yang hadir pada pertemuan tsb antara lain; Bappeda, Dinkes, Diknas, Dinso, BPPKB/BPMPKB, Kasubag Bantuan Hukum, Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Tim PKK, Ketua Kelompok di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC, BMA, Kandepag, Komisi I dan III DPRD Kota Bengkulu. Media.

Hasil pertemuan menyepakati antara lain:

1. Pentingnya pertemuan secara periodic untuk bertukar informasi dan diskusi tentang persoalan HKSR yang terjadi.
2. Forum sebagai ruang untuk menyusun strategi advokasi anggaran karena sering anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
3. Format/ bentuk Forum, Fungsi dan Agenda kerja Forum.



Foto Pelatihan Kepemimpinan bagi Pengurus Community Center Anggota APM —APM/Dok. PERMAMPU



Cahaya Perempuan WCC – Provinsi Bengkulu



Foto Forum Komunitas Akar Rumput Kota Bengkulu/Dok. PERMAMPU

Di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC telah terbentuk Forum Multi-Stakeholder di Kabupaten Rejang Lebong dan di Kota Bengkulu pada April 2015. Pada pembentukan forum ini Walikota/Bupati diwakili oleh Sekda dan APH tidak bias hadir. Namun begitu forum tetap disepakati dan tetap dibentuk oleh Sekda setempat. Peserta yang hadir pada pertemuan tsb antara lain; Bappeda, Dinkes, Diknas, Dinso, BPPKB/BPMPKB, Kasubag Bantuan Hukum, Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Tim PKK, Ketua Kelompok di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC, BMA, Kandepag, Komisi I dan III DPRD Kota Bengkulu. Media

Hasil pertemuan menyepakati antara lain:

1. Pentingnya bertemu secara periodic untuk bertukar informasi dan diskusi tentang persoalan HKSR yang terjadi.
2. Forum sebagai ruang untuk menyusun strategi advokasi anggaran karena sering anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
3. Format/ bentuk Forum, Fungsi dan Agenda kerja Forum.
4. Ada legalitas forum (Surat Keputusan) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota minimal Sekda.
5. Mengkaji ulang RAPERDA Bantuan Hukum untuk Orang Miskin dan RAPERDA Pencegahan dan Penanganan Perempuan & Anak Korban Kekerasan di

Kab. Rejang Lebong.

6. Implementasi Perda No 5 th 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari Kekerasan di Kota Bengkulu
7. Implementasi PERDA tentang Pendidikan di Kota Bengkulu (khususnya penerapan pasal 12 tentang siswi/pelajar yang mengalami KTD dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah yang sama).
8. Menyepakati pertemuan ini selanjutnya ada ruang untuk Forum Multi-Stakeholder termasuk untuk kelompok-kelompok perempuan yang didampingi.



Cerita Perubahan

Ibu Rumah Tangga Menuju Kepala Desa

(Ana Yunita Pratiwi, Staf Lapang DAMAR)



Foto Cerita Perubahan—DAMAR/Dok. PERMAMPU

Dulu saya (Murni) hanya seorang ibu rumah tangga biasa, yang pada masa SMPnya bahkan minta tolong orang lain untuk Membayarkan SPP karena tidak punya nyali. Tetapi setelah mendapat pendidikan dan pendampingan oleh DAMAR dan menjadi anggota Serikat Perempuan Lampung Selatan (SEPALAS), hidup saya berubah. Saya diminta untuk menjadi tim pelatih masyarakat di tingkat kecamatan dan pokja ekonomi kreatif.

Saat itu saya melihat ada anak yang mengalami bibir sumbing. Saya prihatin dan berpikir bagaimana caranya agar anak tersebut bisa di operasi dengan gratis. Akhirnya saya bertemu dengan Yayasan Citra di Korpri dan dari situ saya bisa melakukan sesuatu untuk membantu anak tersebut. Itu luar biasa menurut saya memberikan sesuatu yang orang lain butuh.

Pada saat pemilihan Gubernur, saya diminta oleh Fakultas FISIP Unila untuk melakukan survei keterwakilan masyarakat. Di desa, saya juga terpilih menjadi anggota Tim Verifikasi Dana Perguliran di PNPM. Tugas saya sebagai perguliran dana untuk usaha ekonomi menengah ke bawah. Sepalas baru-baru ini dapat bantuan alat senilai 15 juta, dapat bantuan mesin jahit dari PKBM Tunas Bangsa, dan salah satu kadernya menjadi koordinator pendiri PAUD. Tahun 2015 ini saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mandah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Strategi dan upaya yang dilakukan DAMAR dalam pemenangan saya sebagai Kepala Desa dengan cara:

1. Pemetaan wilayah di Desa Mandah dan mengidentifikasi pemilih potensial.
2. Melakukan survei elektabilitas Calon Kepala Desa untuk mengetahui seberapa besar masyarakat Desa Mandah mengenal saya dan calon lain serta harapan masyarakat terhadap calon lainnya.
3. Konsolidasi Dusun Potensial untuk memperkuat dukungan ke saya
4. Membuat media kampanye yang berisi foto dan slogan saya sebagai Calon Kepala desa.

Pengalaman menapak ruang politik itu memberikan pembelajaran berharga bagi Ibu Murni meski pun belum berkesempatan untuk menjadi Kades Desa Mandah pada pemilihan di bulan Juli 2015 lalu

Pedulikan Sesama Remaja

(Widya Lestri, Staf Lapang Cahaya Perempuan WCC)

“Siapa bilang remaja yang mengalami hamil di luar nikah tidak mempunyai masa depan lagi?. Menurut saya seorang remaja yang mengalami hamil di luar nikah mereka masih mempunyai hak untuk menentukan hidupnya lebih baik lagi, kita tidak boleh memberi pandangan bahwa kejadian yang mereka alami merupakan akhir dari kehidupannya. Mereka adalah korban kekerasan seksual sehingga kita perlu memberi penguatan serta perlindungan kepada korban”.



Kalimat itulah yang disampaikan oleh Dwi Fadillah pada saat ia mendengar sekelompok remaja yang sedang berdiskusi di salah satu lokasi wisata Kota Bengkulu. Topik pembahasan diskusi tersebut adalah tentang remaja yang hamil di luar nikah dan salah satu remaja melontarkan kalimat “remaja yang sudah hamil di luar nikah itu berarti hidupnya sudah hancur tidak memiliki masa depan lagi”. Dengan segera Dwi berupaya memberikan penyadaran kepada teman-temannya agar lebih mengetahui tentang kesehatan reproduksi dengan cara mengobrol ringan dan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Pengetahuan ini didapatkan oleh Dwi sejak bergabung dalam kelompok perempuan muda di Kelurahan Pondok Besi. Di kelompok tersebut ia dikenalkan tentang Program MAMPU, mendapatkan penguatan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam bentuk diskusi, pertemuan berkala, maupun pelatihan. Pengetahuan yang didapatkan oleh Dwi telah merubah cara pandangnya tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan dampak pacaran yang tidak sehat.

Sebagaimana layaknya seorang perempuan remaja Dwi mengetahui bahwa sekarang banyak pengaruh yang tidak baik dalam pergaulan jika kita salah memilih teman. Tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan teknologi mendorong juga perubahan gaya hidup pada remaja yang sangat muda dipengaruhi oleh lingkungan. Cerita ini juga dilihat dari kehidupan teman-teman yang sebaya di mana mereka melakukan pacaran yang tidak sehat, mungkin saja risikonya akan terjadi kehamilan tidak diinginkan. Namun sekarang, dia telah menyadari akan risiko tersebut.

Sejak mengikuti kegiatan bersama anggota kelompoknya sekarang dia merasa pengetahuan tentang HKSR semakin bertambah. Ilmu yang Dwi dapatkan tidak hanya diterapkan dalam kehidupannya saja melainkan juga dibagikan dengan teman-teman lingkungannya. Ia menjadi tempat

mengadu temannya dan memberikan solusi sesuai dengan hasil pelatihan yang ia dapatkan.

Proses Belajar Sepanjang Hidup

(Cahaya Perempuan WCC)

Melli Minarni, adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ia memperoleh penghasilan dengan membuka warung



Foto Pelatihan Manajemen buat dampingan PESADA di

manisan yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada awal tahun 2015, ibu Melli mendapat informasi dari Ketua RT 5 dan staf lapang Cahaya Perempuan WCC mengenai pembentukan kelompok untuk Program MAMPU dia berminat bergabung di kelompok perempuan dewasa ini. Setelah beberapa waktu bergabung dia mendapatkan

penguatan-penguatan baik itu dalam bentuk diskusi, pertemuan berkala maupun pelatihan-pelatihan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi pada perempuan miskin di perkotaan. Peningkatan pengetahuan didapatkan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC. Program ini menjangkau perempuan miskin yang tergabung dalam kelompok dan harus terlibat aktif sesuai dengan perencanaan dan

“Bahwa belajar tidak mesti duduk dibangku sekolah tetapi belajar bisa kita dapat dimana saja dengan siapa saja asal ada kemauan dari dalam diri”



pelaksanaan program agar tercapai tujuan program.

Sejak mengikuti kegiatan bersama anggota kelompoknya sekarang dia merasa pengetahuan tentang hak kesehatan seksual reproduksi dan kesetaraan gender semakin bertambah. Ia mengetahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah salah satunya adalah masalah kesetaraan gender antara suami dan istri. Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan bahwa seorang suami hanya bertugas dalam mencari nafkah keluarga dan seorang

istri mengurus rumah tangga, mengurus anak dan istri sebagai pencari nafkah tambahan. Tetapi sebenarnya istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama.

Ilmu yang

dia dapatkan tidak hanya diterapkan dalam kehidupannya saja melainkan juga dibagikan dengan teman-teman lingkungannya. Pada awalnya suaminya tidak bisa menerima pernyataan ibu Melli yang dianggap merupakan ketidakwajaran dilakukan oleh seorang istri dan merupakan bentuk perlawanan, ibu Melli pun menjelaskan dengan baik bahwa dalam berumah tangga diperlukan kerjasama yang baik antar istri dan suami. Seperti halnya mengurus rumah tangga, mengurus anak itu juga merupakan tanggungjawab seorang suami sehingga tidak semua beban di berikan kepada istri semata. Sekarang suaminya sudah bisa memahami hal tersebut setelah mendapat penjelasan dari istrinya sesuai dengan hasil pelatihan yang dia ikuti namun apabila ada yang hal belum diketahui maka akan dibicarakan bersama

dalam kegiatan pertemuan berkala ataupun diskusi kritis berseri kelompok.

Pembelajaran Baru

(APM)

Dengan semangat Ibu Erna (35 tahun Ibu Rumah Tangga) bercerita mengenai perubahan yang dirasakannya setelah mendapatkan pengetahuan dari diskusi yang dilakukan oleh APM (Aliansi Perempuan Merangin) pada dampingan mereka anggota kelompok CC (*Comunity Center*). Walaupun telah menjadi kader Posyandu, Ibu Erna merasa tidak tahu mengenai hak kesehatan reproduksi apalagi gender dankodrat. Tetapi setelah mendapatkan pendidikan, ia mulai mengetahui alat reproduksi dan hak - haknya.

Ibu Erna melihat bahwa proses diskusi dan pembelajaran mengenai kesehatan seksual dan reproduksi di CC Lentera Hati (Desa Mampun Baru) dilakukan secara terus menerus. Hal ini semakin membuka pemikiran ibu Erna karena dilingkungannya banyak terjadi pernikahan anak. Ia berani berbicara dan mengajak teman-teman kader lainnya untuk memberikan informasi yang benar terkait HKSR kepada masyarakat.

Ia berharap suatu saat nanti ia dapat menjadi fasilitator yang bisa memberikan informasi pada masyarakat terkait isu reproduksi. Ia juga berharap isu reproduksi ini dapat diberikan kepada anak sekolah mengingat karena banyaknya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh siswa di sekolah.

“Dulu saya malu untuk bicara alat reproduksi kepada orang lain, keluarga apalagi kepada anak-anak, itu barang tidak baik [saru] dan memalukan. Saya juga tidak bisa membedakan kodrat antara perempuan dan laki laki. Misalnya mengenai mencari nafkah. Saya mendengar dari masyarakat bahwa itu adalah kodrat laki-laki dan di dapur perempuan. Tetapi sebenarnya tidak demikian”



